

### BAB III

#### KONFLIK SOSIAL DI DESA PAGERSARI TAHUN 1967 – 1980

##### A. Proses pemilihan Kepala Desa Th 1967

Pergantian pemerintahan dari Orde lama ke Orde Baru berdampak sampai pada pemerintahan tingkat pedesaan. Ketika peristiwa G 30 S tahun 1965 terjadi, desa Pagersari dipimpin oleh kepala desa Akhadi yang kemudian diberhentikan sebagai kepala desa karena dituduh terlibat dalam keanggotaan PKI, oleh karenanya perlu dipilih kepala desa pengganti. Sementara belum dilaksanakan pemilihan kepala desa, tugas kepala desa diberikan kepada Marsono seorang nasionalis PNI yang sebelumnya menjabat sebagai carik desa.<sup>1</sup> Penunjukan kepala desa pasca G 30 S terutama mempertimbangkan segi keterlibatan atau keterkaitan orang tersebut dari keanggotaan PKI yang artinya bahwa orang tersebut harus bersih dari keanggotaan ataupun simpatisan PKI. Pemilihan kepala desa Pagersari kemudian berhasil dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 1967.<sup>2</sup> Dalam pemilihan ini diikuti oleh 3 kontestan yaitu Wardono, Suyud dan Dimiyati.

Dari jumlah penduduk sebanyak 2024 jiwa yang memiliki hak pilih sejumlah 1158 jiwa meliputi dusun Pagerjurang 385 jiwa, Karanggawang 90 jiwa,

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan H. Sugito, pada tanggal 20 -11-2011, H.Sugito menyatakan bahwa jabatan pengganti kepala desa Akhadi itu kan jatah yang harus diisi orang nasionalis (PNI) dan Marsono adalah seorang PNI

<sup>2</sup> Lihat Lampiran E, Keputusan pertama menyatakan mengabsjahkan pemilihan Kepala Desa Pagersari yang diadakan pada tanggal 8 Pebruari 1967

Tanggulgingin 160 jiwa, Kamal 236 jiwa, Tapen/Pongangan 273 jiwa dan Jetis 171 jiwa.<sup>3</sup> Wardono berasal dari dusun Pagerjurang yang mayoritas penduduknya penganut paham Muhammadiyah. Dimiyati seorang tokoh NU berasal dari dusun Tapen, sedangkan Suyud seorang pegawai negeri berasal dari dusun Kamal. Diantara 3 calon tersebut, Wardono mendapat dukungan paling kuat dari Muhammadiyah dan PNI (nasionalis) bahkan ada gerakan KAMI KAPPI Kecamatan Mungkid yang dipimpin oleh Ambar yang siap bergerak melakukan demonstrasi kalau Wardono tidak terpilih sebagai kepala desa karena beliau seorang nasionalis yang dianggap jauh dari pengaruh dan keterlibatan dengan PKI, Dimiyati berasal dari dusun Tapen adalah seorang tokoh NU di Pagersari yang tentunya mendapat dukungan masyarakat NU di Pagersari, sedangkan Suyud mendapat dukungan dari mantan kepala desa Pak Akhadi yang sudah lengser dari jabatan sebagai kepala desa namun masih mempunyai pendukung kuat terutama warga dusun Jetis, Pongangan dan Kamal meskipun tidak mutlak karena masih terpecah dengan dukungan untuk Wardono.<sup>4</sup> Ketika pemilihan kepala desa berlangsung, mantan kepala desa Akhadi sedang berada di penjara, namun dukungan terhadap suyud melalui keluarga dan orang-orang dekatnya sangat kelihatan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Lihat lampiran F

<sup>4</sup> Wawancara dengan H. Sugito, pada tanggal 20 November 2011

<sup>5</sup> Wawancara dengan Hj. Mami sukami, pada tanggal 20 November 2011

Pemungutan suara berlangsung 2 kali pemilihan. Pada tahap pertama berlangsung sekitar bulan Januari 1967,<sup>6</sup> Dimiyati mendapat dukungan yang paling kecil diikuti Suyud di urutan kedua dan Wardono mendapat dukungan paling kuat. Kemudian Dimiyati mundur dari pencalonan kepala desa dan dilanjutkan pada tahap kedua pada tanggal 8 Februari 1967 dengan 2 kontestan yaitu Wardono dan Suyud yang mutlak dimenangkan oleh Wardono yang kemudian dilantik pada tanggal 15 Maret 1967.<sup>7</sup>

Sebagian besar penelitian mengenai desa di Indonesia sesudah jaman penjajahan menunjukkan bahwa posisi kepala desa biasanya diduduki berkat keturunan dan bahwa anak laki-laki yang pertamalah (tidak selalu harus demikian) yang biasanya menggantikan jabatan kepala desa apabila ayahnya meninggal atau meletakkan jabatan.<sup>8</sup> DPRD Jawa Tengah dalam studinya telah sampai pada kesimpulan tersebut dan mengetengahkan hasil yang kurang baik dari praktek pemilihan kepala desa bahwa rakyat desa tidak hanya memilih

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan H. Sugito tanggal 20 november 2011. Narasumber lupa waktu tepat pelaksanaan pemilihan tahap pertama, namun hanya dinyatakan sebulan sebelum pemilihan yang kedua, jadi penulis menyimpulkan pemilihan tahap pertama berlangsung sekitar bulan januari 1967 karena pemilihan tahap kedua berlangsung 8 Februari 1967

<sup>7</sup> Lihat Lampiran A tentang *Pengangkatan Wardana Sebagai Kepala Desa Pagersari*, tanggal 15 Maret 1967 dan Lampiran G tentang *Berita Atjara Penjumpahan*. Tanggal 4 April 1967

<sup>8</sup> Koentjaraningrat. *Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga rampai Antropologi Terapan*. (Jakarta:LP3ES, 1984), hlm. 200

karena kecakapan dan kewibawaan sang calon, namun juga banyak bersandar pada penilaian mereka sendiri tentang ayah atau kakek dari calon yang bersangkutan.<sup>9</sup>

#### B. Riwayat singkat Wardono

Wardono lahir pada tanggal 29 Juni 1941 merupakan putra dari almarhum Kromodidjojo yang semasa hidupnya juga menjabat kepala desa. Wardono dilahirkan di lingkungan Islam yang taat, namun memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Pendidikan SD diselesaikan di SD Kanisius Kamal bagian dari wilayah Pagersari pada tahun 1955. Pemilihan SD Kanisius ini karena pada waktu itu satu-satunya SD yang ada di lingkungan Pagersari hanyalah SD Kanisius Kamal.<sup>10</sup> Selepas SD, Wardono melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Muntilan ( sekarang SMPN I) lulus tahun 1958, kemudian melanjutkan pendidikan SMA di Yogyakarta tepatnya di SMA Santo Thomas .<sup>11</sup> Tahun 1962 Wardono melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, namun tidak sampai lulus sarjana karena pada tahun berikutnya tepatnya tahun 1963 diterima bekerja di Direktorat Kepenjaraan Departemen Kehakiman. Baru satu tahun bekerja sebagai pegawai negeri di KPDK ( Kantor Pusat Direktorat

---

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *ibid*, hlm.200 – 201

<sup>10</sup> Wawancara dengan H. Wardono, pada tanggal 29 Juni 2011

<sup>11</sup> Santo Thomas merupaka yayasan pendidikan Katolik di Yogyakarta.

Kepenjaraan) Wardono mendapat tugas belajar di Akademi Ilmu Pemasaryakatan (AKIP).



Gambar 7.

H. Wardono dengan Ibu Hj. Widarsih Wardono <sup>12</sup>

Pada awalnya menjadi kepala desa bukan pilihan dan kemauannya, ketika diminta untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, Wardono sudah memiliki pekerjaan yang mapan sebagai pegawai negeri di Jakarta. Namun karena permintaan dan dukungan keluarga serta masyarakat yang begitu kuat, Wardono memutuskan untuk kembali ke desa mencalonkan diri sebagai kepala desa. Bagi Wardono, keputusan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala desa di Pagersari

---

<sup>12</sup> Foto diambil pada tanggal 3 Mei 2011. Pasangan Wardono dan Widarsih menikah pada tahun 1970 dan dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri.

merupakan pilihan yang sulit karena baginya masa depan di Jakarta dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sudah jelas apalagi ditambah dengan tugas belajar yang sedang dijalaninya. Keputusan untuk pulang ke kampung halaman diperoleh setelah melakukan shalat tengah malam dan tidur di tengah halaman asrama selama beberapa malam kemudian dalam tidurnya, Wardono bermimpi ketemu ibunya terus. Dan pada pagi harinya, Wardono memutuskan untuk ikut serta pulang pada para penjemputnya.<sup>13</sup> Keputusan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa merupakan keputusan yang berat karena Wardono sudah terikat dalam ikatan Dinas dengan instansi tempat bekerja. Dalam kontrak ikatan dinasnya antara lain menyatakan apabila berhenti belajar sebelum masa pendidikan berakhir, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang sudah dilaksanakan. Namun rupanya keberuntungan berpihak pada Wardono, mendekati pemilihan kepala desa, Wardono mendapat tugas Kerja Praktek di Penjara Magelang selama 2 bulan dan lokasi Magelang memang menjadi permintaan khusus Wardono yang mestinya mendapat tugas di Medan. Permintaan lokasi tempat Kerja Praktek diajukan oleh Wardono dengan alasan orang tuanya sudah lanjut usia. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk mempersiapkan mengikuti pemilihan kepala desa karena lokasinya dekat dengan

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan H. Wardono, pada tanggal 29 Juni 2011

kampung halaman sehingga dua-duanya bisa dilaksanakan.<sup>14</sup> Rupanya ada seorang teman yang mengetahui dan kemudian melaporkan keikutsertaan Wardono dalam pemilihan Kepala Desa, kemudian Wardono dipanggil kembali ke tempat pendidikan untuk mempertanggungjawabkan terhadap ikatan dinas yang antara lain menyatakan apabila berhenti sebelum menyelesaikan pendidikan, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh biaya selama mengikuti pendidikan. Akan tetapi dengan alasan karena di Desa Pagersari juga mengemban tugas/amanat dari masyarakat, Wardono diberi ijin dan diberhentikan dengan hormat dari pendidikan termasuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di KPDK Departemen Kehakiman di Jakarta tanpa harus mengembalikan biaya pendidikan sepeserpun.<sup>15</sup>

Ketika dilantik sebagai kepala desa Pagersari pada tanggal 15 Maret tahun 1967,<sup>16</sup> Wardono masih berstatus belum menikah. Baru pada tahun 1970, Wardono menikah dengan Widarsih dan dikaruniai 3 orang anak. Pada tahun 1976, Wardono menunaikan ibadah haji.<sup>17</sup>

C. Masa Transisi Pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru (tahun 1967 – 1968).

---

<sup>14</sup> Rangkuman dari hasil wawancara dengan H. Wardono pada tanggal 29 Juni 2011

<sup>15</sup> Lihat Lampiran H tentang Pemberhentian Tugas Belajar

<sup>16</sup> Lihat lampiran E tentang Berita Atjara Tentang Penjumpahan

<sup>17</sup> Dirangkum dari hasil wawancara dengan H. Wardono, pada tanggal 29 Juni 2011

Peristiwa G 30 S 1965 membawa perubahan besar terhadap kehidupan sosial politik dari tingkat nasional sampai ke wilayah pedesaan. Dalam Undang-Undang No10/1966 terdapat istilah tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI dan atau organisasi terlarang/terbubar lainnya, terutama menyangkut persyaratan untuk menduduki jabatan politik atau publik.<sup>18</sup> Setidaknya terdapat lebih dari 40 peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasikan tahanan politik korban kemanusiaan peristiwa 1965. Peraturan tersebut mendiskriminasikan hak politik, hak mendapatkan pekerjaan, dan hak untuk hidup layak. Bahkan setelah dibebaskan dari penjara dan Pulau Buru tahun 1979, para mantan tahanan politik dikenai peraturan wajib lapor. Mereka juga dianggap “tidak bersih lingkungan” dan mendapat stigma negatif dan kartu tanda penduduknya diberi kode ET (eks tapol).

Berhubungan dengan Undang-Undang no 10 tahun 1966 di desa pagersari adalah diberhentikannya Akhadi sebagai kepala desa karena dituduh mempunyai keterkaitan dengan PKI ( Akhadi seorang pengurus PKI kabupaten Magelang). Selain kepala desa, juga beberapa warga yang kemudian ditangkap, ditahan bahkan ada yang dibawa sampai ke Nusakambangan dan Pulau Buru. Pada periode ini, pemerintahan Desa Pagersari dihadapkan dengan permasalahan bagaimana menghadapi sisa-sisa PKI baik yang bebas maupun yang ditahan dimana mereka secara tersirat memendam kebencian dan ketidakrelaan karena

---

<sup>18</sup> Lihat undang-undang no 10 tahun 1966



mendapat perlakuan diskriminatif. Perlakuan diskriminatif yang paling dirasakan oleh warga yang mendapat sebutan eks PKI adalah diberikannya tanda eks Tapol (ET) atau Organisasi Terlarang (OT) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dirasakan sangat memberikan batasan terhadap eksistensi kehidupan. Dengan tanda ET pada KTP ini menjadi momok besar yang membatasi ruang gerak bukan hanya pada yang bersangkutan namun sampai keluarga besarnya. Beberapa orang tua yang mendapat tanda OT pada KTPnya bahkan memalsukan identitas anaknya sebagai anak dari adik atau kakaknya yang bersih dari sebutan eks PKI demi menyelamatkan masa depan anak-anaknya. Seperti yang terjadi pada anak-anak Bugel Sunyoto yang ketiga anaknya menuliskan data nama orang tua pada administrasi di sekolah menggunakan nama orang tua yang berbeda-beda untuk demi menyelamatkan masa depan keluarganya.<sup>19</sup>

#### D. Masa Konsolidasi dan menghadapi transisi masyarakat ( th 1968 – 1969)

Tahun 1969 bisa dikatakan sebagai masa akhir transisi dari orde lama ke Orde Baru, mulai 1 April 1969 pemerintah mengalihkan perhatian utamanya dari stabilisasi ekonomi menuju pembangunan dengan menerapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita I) tahun 1969 – 1974.<sup>20</sup> Sedangkan dalam

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bugel Sunyoto (70 tahun), pada tanggal 26 Desember 2011

<sup>20</sup> Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Modern 1200 -2004*. (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), hlm. 582.

pemerintahan desa Pagersari bisa dikatakan sebagai masa konsolidasi dalam kepemimpinan sebagai kepala desa yang baru. Permasalahan yang harus dihadapi Wardono dalam kehidupan masyarakat Pagersari adalah kompleksnya struktur sosial dimana satu dengan yang lain potensial terjadi konflik. Bekal ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dan pekerjaannya di Dinas kepenjaraan dijadikan sebagai modal menghadapi berbagai karakter masyarakat.<sup>21</sup>

Menghadapi sisa-sisa PKI (orang-orang eks PKI), Wardono menangkap bahwa mereka adalah orang-orang yang *kagol* sehingga yang demikian harus dihadapi dengan *bombongan* agar orang-orang demikian merasa masih dihargai dan mendapat tempat di masyarakat.<sup>22</sup> Terhadap beberapa orang eks PKI yang dipandang bisa diajak komunikasi, Wardono melakukan silaturahmi dengan mengajak ngobrol bila kebetulan bertemu namun Wardono menghindari berkunjung secara langsung ke rumah-rumah para eks PKI karena merasa bahwa bagaimanapun sebagai kepala desa harus tetap menjaga jarak demi menjaga kredibelitasnya sebagai kepala desa yang jauh dari pengaruh PKI. Seperti yang pernah dilakukan terhadap Pak Teguh pengrajin tahu dari dusun Jetis yang kebetulan beberapa kali bertemu diajak diskusi seputar usahanya dan bagaimana

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan H. Wardono pada tanggal 29 Juni 2011

<sup>22</sup> Wawancara dengan H. Wardono tg. 20 November 2011. *Kagol* dalam bahasa Indonesia artinya adalah kecewa, *bombongan* artinya adalah dibesarkan hatinya

mengembangkan produksi maupun pemasarannya.<sup>23</sup> Begitu juga dengan Pak Karnen dari Pongangan bekas guru SD yang diberhentikan karena dituduh terlibat dalam keanggotaan PKI yang kemudian menjadi tukang cukur . Pak Wardono menjadi pelanggan setia pada usaha cukur Pak Karnen ini sambil mendalami isi pikiran Pak Karnen ini terhadap kehidupan sosial di sekitar desa Pagersari . Dalam silaturahmi dengan orang-orang eks PKI, Wardono berusaha merangkul memberikan *bombongan* namun juga tetap membina dengan tujuan supaya orang-orang ini tidak menjadi penghambat terhadap jalannya tugas-tugas pemerintahan. Dalam pengamatannya orang-orang eks PKI di tingkat desa ini tetap memiliki persatuan yang kuat sangat kelihatan sekali pada acara-acara hajatan atau peristiwa kematian dimana berkumpul warga masyarakat, orang-orang eks PKI ini pasti mengelompok menjadi satu karena mereka masih memiliki perasaan sebagai satu kelompok. Yang seperti ini sulit dihilangkan karena memang ini bagian dari ideology mereka . Di mata Wardono, organisasi PKI memiliki ideology tingkat tinggi dimana diantara anggotanya memiliki ikatan kesatuan yang kuat sehingga tetap harus diwaspadai,oleh karenanya komunikasi yang dilakukan Wardono sebatas untuk mengetahui kedalaman hati mereka terhadap pelaksanaan kehidupan pemerintahan desa maupun bagaimana komunikasi para eks PKI ini dengan masyarakat di sekitarnya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Dalam sebuah wawancara pada tanggal 26 Desember 2011, Teguh menyatakan kesenangannya diajak diskusi seputar usahanya sebagai pembuat tahu

<sup>24</sup> Wawancara dengan H. Wardono, pada tanggal 20 November 2011

Ada peraturan yang tidak memperbolehkan orang-orang eks PKI terlibat dalam kegiatan-kegiatan desa, antara lain adalah tidak boleh mengikuti kegiatan organisasi baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah, juga tidak boleh menduduki jabatan-jabatan formal maupun non formal di masyarakat. Secara resmi memang aturan- aturan demikian dipatuhi oleh Wardono, namun dengan pendekatan silaturahmi yang dilakukan, maka orang-orang eks PKI ini akan tetap merasa dihargai. Dalam pendekatan dan silaturahmi yang dilakukan, Wardono juga tetap melakukan pembinaan-pembinaan secara tidak langsung. Satu hal yang menurut Wardono tidak boleh terjadi adalah para eks PKI ini menjadi tokoh yang melakukan komunikasi secara langsung sebagai pemimpin masyarakat melalui perkumpulan-perkumpulan maupun organisasi di pedesaan baik kesenian, agama maupun yang lain.<sup>25</sup> Bekal pendidikannya di Akademi Ilmu Pemasarakatan dan pengalaman bekerja di Departemen Kehakiman dimanfaatkan untuk menghadapi para eks PKI ini dan juga masyarakat yang lain.<sup>26</sup>

E. Konflik Inter Dusun dan Antar Dusun di Desa Pagersari sekitar tahun 1970 – 1980

---

<sup>25</sup> Dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 20 November 2011, H. Wardono menyatakan bahwa apabila para eks PKI tersebut menjadi pemimpin perkumpulan maupun organisasi apapun dikhawatirkan bisa menggalang kekuatan kembali.

<sup>26</sup> Wawancara dengan H. Wardono, pada tanggal 20 November 2011

Pada sub bab ini, penulis akan membahas mengenai berbagai konflik yang terjadi baik konflik yang berlatar belakang keluarga, agama maupun konflik yang berlatar belakang sosial politik.

### 1. Konflik Berlatar Belakang Masalah Keluarga

Di setiap desa terdapat keluarga-keluarga yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat, mereka ini terdiri dari golongan *bendara* dan *priyayi* yang sangat dihormati dan mempunyai pengaruh kuat di masyarakat.<sup>27</sup> Keluarga-keluarga ini mempunyai peran penting dalam mengendalikan kehidupan sosial di desa. Sebagai contohnya di Dusun Jetis ada keluarga Mbah Madun, di Dusun Tapen ada keluarga Ngoro(Sugiarto) dan Dimiyati, di Dusun Pagerjuran ada keluarga Mas Tjokro, Di dusun Kamal ada keluarga Suyud.<sup>28</sup> Pengaruh keluarga-keluarga *bendara* dan *priyayi* ini banyak dimanfaatkan Wardono sebagai spirit untuk menarik simpati dan menggerakkan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam melancarkan program-program pemerintahan maupun dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial meskipun kadang permasalahan justru terjadi bersumber dari latar belakang para keluarga kelas atas ini.

Di satu sisi memang golongan *bendara* dan *priyayi* di pedesaan bisa menjadi spirit yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan desa,

---

<sup>27</sup> Lihat Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 344.

<sup>28</sup> Wawancara dengan H. Sugito (72 tahun), pada tanggal 15 Oktober 2011

namun di sisi lain di antara kelompok kerabat sendiri bisa terjadi konflik-konflik yang permasalahannya sampai harus melibatkan kepala desa untuk mengatasinya. Permasalahan dalam konflik antar warga yang masih mempunyai hubungan kekerabatan yang paling sering terjadi dilatarbelakangi oleh masalah pembagian harta warisan.

Di dusun Jetis, keluarga besar almarhum Mbah Madun termasuk keluarga yang dihormati dan disegani. Putra tertua Mbah Madun yaitu Amat Danuri bahkan menduduki jabatan sebagai kepala dusun sampai meninggal pada tahun 1978. Beliau termasuk kepala dusun yang sangat disegani dan dihormati bahkan cenderung ditakuti. Amat Danuri mempunyai 5 orang adik yang semuanya tinggal di dusun yang sama. Di antara keluarga besar Mbah Madun sendiri konflik di antara kerabat terjadi dilatarbelakangi oleh pembagian harta warisan yang tidak tuntas sepeninggal Mbah Madun. Meskipun ada permasalahan yang menyelimuti kerabat keturunan Mbah Madun namun di antara putra-putra Mbah Madun yaitu Amat Danuri, Surasa, Kertoredjo dan Pak Muh serta dua saudara perempuannya adalah keluarga-keluarga terhormat yang disegani di masyarakat. Di antara putra putri Mbah Madun, yang mempunyai pengaruh kuat di masyarakat Jetis adalah Amat Danuri, Surasa dan putra dari Kertoredjo yaitu Sugito seorang guru/ kepala sekolah SD yang dalam struktur pemerintahan desa Pagersari dibawah pimpinan

H. Wardono dipilih sebagai ketua LKMD bahkan sampai periode kepemimpinan kepala desa sesudah Wardono.<sup>29</sup>

Di dusun lain tepatnya di dusun Kamal, konflik yang berlatar belakang keluarga juga terjadi pada keluarga besar Pak Ranudimejo, keluarga besar ini juga termasuk keluarga yang dihormati dan disegani dan masing-masing anggota keluarganya mendapat sebutan (gelar) tambahan “Mas” yang sebenarnya adalah kepanjangan dari “Den Mas” menunjukkan sebutan untuk golongan masyarakat kelas atas di pedesaan. Perseteruan di antara saudara sepupu “Mas Ranu” dengan keluarga “Mas Jamal” dilatarbelakangi oleh masalah pembagian harta warisan generasi sebelumnya yang tidak tuntas. Permasalahan ini menurun sampai pada generasi Mas Ranu yang tempat tinggalnya bersebelahan dengan keluarga Mas Jamal. Perseteruan di antara keduanya bahkan sampai berakhir di pengadilan, sehingga melalui jalur hukumlah perseteruan memperebutkan harta warisan ini akhirnya diselesaikan. Jalur hukum ini ditempuh karena perangkat desa sudah tidak mampu lagi mendamaikan melalui jalan musyawarah dan perundingan, sehingga kepala desa menyarankan penyelesaian melalui jalur hukum. Lewat jalur hukum, pengadilan memutuskan bahwa harta warisan yang diperebutkan itu dimenangkan oleh “Mas Ranu” dan selaku kepala desa, H. Wardono turut berperan sebagai saksi dan kesaksian yang diberikan berupa kesaksian

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan H. Sugito (72 tahun) pada tanggal 15 Oktober 2011, diperkuat wawancara dengan Bugel Sunyoto (70 tahun) pada tanggal 26 Desember 2011

administratif yaitu berupa bukti-bukti administratif yang menunjukkan bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut memang sah milik keluarga “Mas Ranu”.<sup>30</sup>

Di dusun Karangawang berbeda lagi permasalahannya, yaitu antara 2 saudara sepupu yaitu Pak Waliyun dengan Pak Kromodiarjo, peristiwanya terjadi sekitar tahun 1985 yaitu ketika dusun ini akan membangun masjid di atas tanah wakaf dari Pak Waliyun dan Pak Muhtarom. Permasalahan yang memicu konflik berkepanjangan adalah letak bangunan masjid, Pak Kromo menghendaki masjid dibangun di tepi jalan sehingga lebih berkesan fungsinya untuk masyarakat umum, namun Pak Waliyun sebagai pemberi tanah wakaf menghendaki letak bangunan masjid berdekatan dengan rumahnya. Oleh karena perselisihan pendapat ini tidak ada titik temu, maka panitia pembangunan masjid kemudian menemui kepala desa (Pak Wardono) untuk bisa menengahi sehingga pembangunan masjid bisa terus berjalan. Upaya yang dilakukan kepala desa untuk mencari jalan tengah adalah dengan mempelajari permasalahan, kemudian mendengar suara dari masing-masing pihak yang berselisih dan juga mendengar suara masyarakat. Setelah banyak mendapatkan informasi, Pak Wardono kemudian memanggil dua pihak yang berselisih untuk diajak musyawarah, namun dalam musyawarah yang dipimpin kepala desa ini tidak berhasil mencapai kemufakatan. Kemudian Pak Wardono mengumpulkan warga dusun Karangawang untuk diminta pendapatnya mengenai dimana masjid akan

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan H. Wardono (70 tahun), pada tanggal 20 November 2011



dibangun dan suara mayoritas warga lebih banyak mendukung Pak Waliyun, sehingga kepala desa memutuskan bahwa letak bangunan masjid Karanggawang di dekat bangunan rumah Pak Waliyun.<sup>31</sup>

## 2. Konflik yang Berlatar Belakang Paham Agama ( NU dan Muhammadiyah)

Muhammadiyah dan NU adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, perbedaan keduanya sebetulnya bukan pada masalah fiqh. Hanya dalam konteks Indonesia, Muhammadiyah dan NU adalah mewakili 2 golongan besar umat Islam secara fiqh juga. Muhammadiyah mewakili kelompok "modernis" meskipun sebenarnya ada beberapa organisasi yang memiliki pandangan hampir sama seperti Persis (Persatuan Islam), Al-Irsyad, Sumatra Tawalib.<sup>32</sup> Sedangkan NU (Nahdhatul Ulama) mewakili kelompok "tradisional", ada juga organisasi lain yang juga berpandangan hampir sama seperti Nahdhatul Wathan, Jami'atul Washliyah, Perti, dll. Kedua organisasi ini memiliki berbagai perbedaan pandangan. Dalam masyarakat perbedaan paling nyata adalah dalam berbagai masalah *furu'* (cabang). Misalnya Muhammadiyah melarang (bahkan membid'ahkan) bacaan Qunut di waktu Shubuh, sedang NU mensunahkan, bahkan masuk dalam ab'ad yang kalau tidak dilakukan harus melakukan sujud syahwi, dan berbagai masalah yang lain.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Maksum (65 tahun), mantan Kepala Dusun Karanggawang, pada tanggal 26 desember 2011

<sup>32</sup> Lihat Official Website.Imam Suprayoga. *Ranah Perbedaan Antara NU dan Muhammadiyah.*( Jum'at 15 Oktober 2010)

Muhammadiyah lahir tahun 1914, didirikan oleh KH Ahmad Dahlan adalah organisasi yang lahir dari inspirasi pemikir-pemikir modern seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida (yang sangat rasional) sekaligus pemikir salaf (yang literalis) seperti Ibn Taymiah, Muhammad bin Abdul Wahab. Wacana pemikiran modern misalnya membuka pintu ijtihad, kembali kepada Quran dan Sunah, tidak boleh taqlid, menghidupkan kembali pemikiran Islam. Sedang wacana salaf adalah bebaskan takhayul, bid'ah dan khurafat (TBC). Tetapi dalam perkembangannya Muhammadiyah sangat bersemangat dengan tema membebaskan TBC. Yang menjadi masalah, banyak dari kategori TBC tersebut justru diamalkan di kalangan NU, bahkan dianggap sebagai sunah. Karena sifatnya yang dinamis, praktis dan rasional, Muhammadiyah banyak diikuti oleh kalangan terdidik dan masyarakat kota.<sup>33</sup>

Di sisi lain Nahdhatul Ulama, didirikan antara lain oleh KH Hasyim Asy'ari (1926), lahir untuk menghidupkan tradisi bermadzhab mengikuti ulama dan NU akomodatif terhadap berbagai tradisi yang sudah ada di masyarakat. Berbagai tradisi yang berhubungan dengan siklus hidup manusia yaitu lahir, hidup dan mati yang kemudian dikemas dalam nuansa islami masih dilaksanakan di kalangan penganut NU, sehingga pengaruh NU memang sangat Nampak di kalangan masyarakat pedesaan yang masih banyak melaksanakan tradisi. Pada masyarakat

---

<sup>33</sup> *ibid*

desa dengan pemahaman ilmu agama yang sederhana, perbedaan-perbedaan kecil saja mudah sekali memicu terjadinya konflik. Seperti yang pernah terjadi di Masjid Nurul Huda di dusun Jetis sekitar tahun 1976 dalam ibadah shalat tarawih yang dipimpin imam dari dusun Pagerjuran yaitu pak Ahmat' shalat dilaksanakan dalam 11 raka'at, namun jamaah menghendaki sejumlah 23 raka'at yang kemudian memicu perdebatan sengit dan akhirnya jamaah Masjid tidak mau dipimpin oleh Pak Ahmat. Lebih dari itu bahkan dusun Pagerjuran itu oleh warga dusun-dusun yang lain dicap sebagai dusun Muhamadiyah atau dengan sebutan *kamandiyah*<sup>34</sup> yang dalam banyak hal pada masyarakat dusun telah terbentuk asumsi bahwa masyarakat *kamandiyah* ekstrim di mata penganut paham yang lain. Pandangan ekstrim terhadap dusun Pagerjuran ini sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari terutama pada saat terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam masyarakat. Misalnya pada bulan Sya'ban sebelum bulan puasa, beberapa dusun di Pagersari seperti Jetis, Tapen, Pongangan, Kamal, Tanggulangin dan Karangawang secara bergantian melaksanakan tradisi *ruwahan/nyadran* yaitu tradisi mengirim doa untuk para leluhur dan bersih makam yang dilaksanakan bersama-sama warga dusun, yang kemudian diakhiri dengan selamatan bersama warga satu dusun dengan mengundang warga dusun yang lain. Selain Dusun

---

<sup>34</sup> Istilah *Kamandiyah* merupakan sebutan untuk para penganut paham Muhammadiyah yang oleh masyarakat penganut paham NU dianggap ekstrim terutama karena tidak mengadaptasi terhadap berbagai tradisi yang sudah berkembang di masyarakat

Pagerjurang tidak pernah melaksanakan tradisi ini, sehingga warganya juga tidak pernah diundang oleh dusun-dusun yang lain. Namun dalam acara-acara dusun termasuk nyadran ini biasanya Pak lurah Wardono menyempatkan untuk hadir. Bahkan pada hari raya idul fitri, jarang ada warga dusun Jetis atau Tapen yang mau bersilaturahmi ke Pagerjurang karena menganggap sebagai dusunnya orang *kamandiyah* lebarannya tidak sama.<sup>35</sup> Dengan demikian sudah terbentuk semacam *stereotype* terhadap warga pagerjurang yang dianggap sebagai *kamandiyah*.

Peristiwa pembangunan Masjid di dusun Tapen terjadi pada tahun 1976. Bermula dari tanah wakaf yang diberikan oleh keluarga Den Dar ( Pak Giarto) yang kebetulan keluarga ini adalah pengikut paham Muhamadiyah bahkan Bu Titik, istri Den Dar adalah pengurus cabang muhammadiyah yang sangat aktif. Ada perbedaan pendapat dalam konsep letak maupun bentuk bangunan antara pemberi tanah wakaf dengan perangkat dusun yang kebetulan seorang Nahdhiyin, yaitu Pak Dimiyati.<sup>36</sup> Proses pembangunan Masjid sempat berjalan hampir terhenti karena tidak ada kesesuaian pendapat antara Pak Dimiyati dengan Den Dar, namun setelah Pak Lurah Wardono turun tangan dengan berusaha melakukan pendekatan-pendekatan pada dua pihak dan meminta masukan dari warga masyarakat Tapen, maka pembangunan masjid bisa berlangsung dan kokoh

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan H. Riyadi, pada tanggal 20 November 2011

<sup>36</sup> Wawancara dengan Duiman, pada tanggal 21 November 2011

berdiri. Rupanya peristiwa ini terulang kembali di tahun 1985 an ketika Pak Yono dan Pak Bejo (keduanya orang muhammadiyah) ingin memperbaiki masjid Tapen. Oleh karena yang ingin memperbaiki adalah orang-orang Muhamadiyah, oleh Takmir Masjid tidak diperbolehkan. Dusun Tapen masih sangat fanatik terhadap NU.<sup>37</sup>

### 3. Konflik yang Berlatar Belakang Paham Politik (PKI dengan NU dan Muhammadiyah)

Peristiwa Gerakan 30 September 1965, secara politis tersingkir dua kekuatan politik utama yaitu Soekarno dan PKI, di sisi lain terjadi perubahan besar dalam struktur politik sangat menyolok yaitu pada lembaga dan organisasi politik . Kelahiran Orde Baru sebagai pengganti pemerintahan orde lama telah melahirkan berbagai catatan penting dalam sejarah Indonesia, antara lain adalah kekuatan menumpas PKI. Sejarah mencatat bahwa dalam menumpas gerakan kontra revolusioner tersebut muncul tiga kekuatan utama yang sangat dominan dan berusaha mati-matian demi lumpuhnya PKI.<sup>38</sup> Ketiga kekuatan tersebut adalah kalangan Islam, tentara dan angkatan muda yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa yang selanjutnya disebut angkatan 66. Kalangan Islam menjadi

---

<sup>37</sup> Wawancara dengn H. Wardono pada tanggal 20 November 2011, didukung wawancara dengan Duiman pada tanggal 21 November 2011

<sup>38</sup> .Karim, M.Rusli.*Perjalanan Partai Politik di Indonesia:Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta:Rajawali1983), hlm.153

kekuatan politik utama karena PKI sebelum kehancurannya lebih dikenal sebagai kelompok “anti agama” dan kelompok Islam menjadi sasaran PKI karena Islam adalah kekuatan besar yang secara organisatoris waktu itu dipandang lemah namun disegani dalam mengembangkan pengaruh komunis di Indonesia.<sup>39</sup> Pada tahun-tahun awal 1960 an umat Islam memang sangat tersisih, tidak mempunyai suara di gelanggang politik nasional, dengan adanya gerakan menumpas PKI yang dipimpin oleh tentara, umat Islam merasa terpanggil karena kehancuran komunis berarti kehilangan musuh utama yang akan berdampak angin segar bagi kalangan umat Islam dalam kehidupan politik di Indonesia. Karena itu seruan “ganyang PKI” pertama-tama disambut oleh umat Islam begitu bersemangat . Dengan dukungan TNI Angkatan Darat , umat Islam bersama kekuatan sosial yang lain berada di barisan depan dalam memberantas PKI di Indonesia. Di sisi lain keterlibatan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam dua organisasi besar yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) dalam menumpas PKI dapat pula dipandang sebagai suatu kebangkitan pelajar-mahasiswa untuk menebus kekalahannya terhadap kesatuan pemuda pelajar dan mahasiswa underbouw PKI yang sangat dominan terutama di tahun-tahun 1960 an sampai pecahnya peristiwa G 30 S tahun 1965.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 154 – 157

<sup>40</sup> Lihat Karim, M.Rusli, *ibid*, hlm 154 – 155

Gerakan “ganyang PKI” ternyata juga menjalar sampai ke desa Pagersari yang kebetulan kepala desanya tersangkut (eks PKI) yaitu Pak Akhadi yang kemudian diberhentikan. Peristiwa pembakaran rumah-rumah penduduk di dusun Jetis terjadi sekitar bulan Maret tahun 1966 sesaat setelah diumumkan pembubaran PKI. Sekelompok pemuda selepas shalat Jum’at dari Masjid Sirojudin di belakang pabrik kertas berjalan berbondong-bondong menuju rumah Pak Akhadi di dusun Pongangan, kemudian berbalik menuju dusun Jetis. Di dusun Jetis inilah, beberapa rumah warga dibakar habis.<sup>41</sup> Beberapa rumah yang dibakar antara lain adalah rumah Muhadi, rumah Poniman, rumah Suhono, rumah Pak Mangun. Selain rumahnya dibakar, perabotan rumah dan segala macam pecah belah diobrak abrik hampir tidak ada sisa perabotan rumah yang bisa dimanfaatkan. Akan tetapi Muhadi masih beruntung meskipun rumahnya hancur rata dengan tanah, masih ada rumah orang tua yang bersebelahan dengannya, sehingga sebelum bisa membangun kembali rumahnya, Muhadi tinggal bersama orang tuanya sampai dua tahun kemudian bisa membangun kembali rumah tinggalnya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan H. Sugito pada tanggal 20 November 2011.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Muhadi pada tanggal 26 Desember 2011



Gambar 8. Rumah Muhadi<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Rumah Muhadi yang terlihat tegak berdiri ini, pada bulan Maret 1966 pernah rata dengan tanah akibat dibakar massa karena Muhadi dituduh anggota atau simpatisan PKI dan di rumahnya pernah dijadikan tempat latihan tari para angora Gerwani